

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

- Pada November 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,73 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,48. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Palembang sebesar 0,95 persen dengan IHK sebesar 105,89 dan terendah terjadi di Kabupaten Muara Enim sebesar 0,08 persen dengan IHK sebesar 108,43
- Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,68 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,78 persen; kelompok transportasi sebesar 1,60 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,55 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,87 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,50 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,69 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,21 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,17 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,64 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,37 persen.
- Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Provinsi Sumatera Selatan Bulan November 2024 sebesar 0,58 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 0,70 persen

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Kelancaran Distribusi

Hampir sebagian besar kebutuhan pangan di Kabupaten Musi Banyuasin didatangkan dari luar daerah yang melalui jalan negara/provinsi dimana kondisi *jalan tersebut rusak* dan menghambat distribusi barang *serta adanya kenaikan BBM dari Pemerintah berdampak pada kenaikan harga*.

2. Komunikasi Efektif

Belum pahamnya sebagian masyarakat tentang pentingnya pengendalian inflasi perlu edukasi yang terus menerus dan perlunya kerjasama yang baik antar Perangkat Daerah (PD) dan dengan daerah penghasil.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Pencanangan Gerakan menanam
- 1. Dalam rangka pengendalian inflasi daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan gerakan tanam cabai dan pangan lainnya untuk meningkatkan ketersediaan komoditas pangan di tingkat rumah tangga.
- 2. Koordinator adalah Bagian Perekonomian Setda Kab. Muba dengan Pencanangan Gerakan menanam di Kabupaten Musi Banyuasin mengacu pada GSMP Sumatera Selatan. Melalui Bagian Perekonomian dengan gerakan pemanfaatan pekarangan dengan pembiayaan bersumber dari CSR atau Anggaran masing-masing Intansi.

Gerakan menanam cabe yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK bekerjasama dengan Dinas TPHP serta masyarakat di 15 Kecamatan dengan 2.000 Polybag per BPP. Khususnya di Kecamatan Tungkal Jaya luas 3 ha Poktan Subur, sudah menghasilkan cabe yang di panen oleh masyarakat dan hasil panen cabe tersebut sebagian dibagikan kepada masyarakat yang mengelola nya dan sebagian lagi di jual kepada pegadang di pasar.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan berbagai kegiatan pengendalian inflasi pada triwulan IV diantaranya melakukan operasi pasar murah beras murah, gerakan pangan murah, menanam cabai dan beberapa kegiatan lainnya. Dalam mengatasi kenaikan harga beras yang diakibatkan oleh fenomena El Nino. Dari beberapa kegiatan yang telah di lakukan dapat mengendalikan harga beras dan pangan lainnya di pasar serta meringankan beban ekonomi masyarakat dan Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor pada bulan Juli untuk menjaga kestabilan harga bahan pangan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Musi Banyuasin pada triwulan IV tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Mengiatkan kegiatan Rapat Koordinasi / Focus Group Discussion / High Level Meeting baik tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun pusat.
2. Berkaitan dengan tariff BBM agar dapat dikendalikan oleh Pemerintah dan pembiayaan BBM bersubsidi tepat sasaran.
3. Diharapkan agar Perum Bulog Drive Sumsel untuk dapat menambah SDM agar pelaksanaan Operasi Pasar Murah di Kabupaten Musi Banyuasin dapat lebih massif.
4. Optimalisasi kerja sama antar daerah yang dilakukan dengan cara menyuplai pasokan ke daerah-daerah defisit, dari daerah surplus.